

KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DALAM MENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARPOL

Mohamad Iqbal

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

A democratic country that is based on the law, there is the protection of the human rights of its citizens. One of the rights that should be guaranteed by a State is the right of freedom of association, assembly and expression, as stated in its constitution, namely the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. It can be seen in the provisions of Article 28 and 28E (3) UUDNRI 1945, concerning freedom of association and assembly, issued thoughts with oral and written, and so on are set by the Act and the provisions of Law No. 2 year 2011 concerning amendments to Act No. 2 of 2008 on Political Parties. With these freedoms, the government should be fair to the political parties that did not get state financial aid granted proportionally, while financial aid is only given to the political parties which have gained seats in the Parliament. Which cause many problems, whether financial aid political parties which have gained seats in the Parliament and the Council under the provisions of Law No. 2 of 2011 on political parties reflects the principle of popular sovereignty with justice. Corresponding problems mentioned above, this thesis is a normative study described prescriptive. Importance given financial aid to political parties, to strengthen the implementation of democracy and party system that is effective in accordance with the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and the formation of political parties and the democratic process in the form of grants aim to recruit and retain the power to implement / realizing programs compiled with a particular ideology. In addition, provision must also reflect the principle of popular sovereignty with justice.

Keywords: *Capacity, Political Party, Financial Aid*

Negara demokrasi yang didasarkan atas hukum, terdapat perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Salah satu hak asasi yang perlu dijamin oleh suatu Negara adalah hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Indonesia sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum, menjamin hak warga negaranya dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana tertuang dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945). Hal itu dapat berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu:

Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 28 E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia atau dalam hukum tata negara sebagai sistem kenegaraan. Olehnya inilah yang menjadi dasar bagi warga Negara Indonesia untuk bisa mendirikan suatu organisasi, termasuk mendirikan atau bergabung dalam suatu partai politik.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Selanjutnya ditulis UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik) menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai sebuah organisasi nasional yang bergerak dibidang politik, Partai politik memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Diantara sekian hak dari partai politik dalam Pasal 12 undang-undang parpol ini adalah memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Selain hak tersebut di atas, dalam ketentuan Undang-undang Partai politik ini juga menyebutkan, bahwa setiap partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang ini diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Yang mana tujuan dari pemberian bantuan keuangan dari APBN/APBD tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Jika dikaji lebih dalam berdasarkan isi ketentuan undang-undang ini memberikan pemahaman bahwa pemberian bantuan keuangan untuk partai politik tersebut hanya akan diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR, dan DPRD Prov/Kab/Kota yang perhitungannya berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara.

Hal ini mencerminkan bahwa Negara melalui pemberlakuan peraturan ini menunjukan kecenderungan untuk tidak berlaku adil atau diskriminatif terhadap partai politik lain yang tidak memperoleh kursi di DPR maupun DPRD, yang berdasarkan ketentuan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan partai politik yang mendapatkan kursi di DPR maupun DPRD dalam pemilihan umum.

Harusnya semua partai politik tanpa kecuali mendapatkan bantuan keuangan partai politik baik berasal dari APBN maupun APBD sebab tanggung jawab partai politik adalah sama jika mengacu pada ketentuan undang-undang parpol. Jika tugas dan tanggung jawab parpol adalah sama, kenapa mesti adanya perbedaan mengenai pemberian bantuan keuangan partai politik yakni hanya yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah suara? Sementara tujuan dari dana bantuan keuangan parpol tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan keuangan Parpol adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Ini sungguh tidak adil, karena semua partai politik baik yang memperoleh kursi maupun tidak melakukan peran yang dimaksud.

Negara harus bersikap adil dalam memberlakukan aturan pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik di Indonesia. Mestinya partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR dan DPRD juga mendapatkan bantuan keuangan parpol dari APBN dan APBD. Sebab calon legislatif dari

partai itu pasti juga mendapatkan suara dari rakyat pada pemilihan umum. Namun tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi di DPR maupun DPRD yang diperebutkan bersama partai-partai pesaingnya. Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Apakah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang telah mendapatkan kursi di DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik telah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan Bagaimana Pengaturan partai politik hubungannya dengan sistem keuangan parpol. Tujuan penelitian: Untuk menganalisis pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik yang telah mendapatkan kursi di DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan Untuk mengetahui pengaturan sistem keuangan partai politik. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberi input bagi progres ilmu hukum administrasi negara, dalam menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian yang bersifat normatif

Pendekatan

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Bahan Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang diarahkan pada penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya yang berkaitan langsung dengan pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi, jurnal hukum, serta pendapat para pakar hukum.

Pengumpulan Bahan

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan adalah melalui telaah kepustakaan atau menggunakan studi literatur untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

Analisa Bahan

Setelah bahan dikumpulkan dan dirasa telah cukup, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis secara mendalam sehingga diperoleh hasil dari persoalan hukum yang diteliti. Setelah bahan dianalisis langkah selanjutnya akan dilakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Partai Politik

a. Kedudukan Partai Politik Sebagai Badan Hukum

Partai Politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum akan tetapi sebagai badan hukum parpol itu tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum parpol adalah perorangan warga negara sebagai *natural person* status parpol sebagai badan hukum itu

sangat penting dalam hubungan dengan kedudukan parpol itu sebagai subjek dalam lalu lintas hukum. Dalam ilmu hukum subjek hukum itu adalah setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang biasa yang disebut *naturlik person* atau bukan orang biasa yang lazim disebut *Recht person*. Subjek hukum *Recht person* itulah yang biasa dikenal dengan istilah badan hukum yang merupakan *persona fiktia* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona* (orang fiktif).

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan mengenai keberadaan dan status dari partai politik sebagai badan hukum, yakni Pasal 3 disebutkan:

- (1) Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai:
 - a. akta notaris pendirian partai politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
 - e. rekening atas nama partai politik.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut terlihat bahwa kelahiran partai politik

sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), ada karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Oleh sebab itu partai politik disebut badan hukum sesuai dengan teori kenyataan yuridis yang memahami keberadaan dan kapasitas dari badan hukum sebagai subjek hukum yang diciptakan berdasarkan hukum, yang mana ketentuan hukum yang menyatakan badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan serta memberikan hak dan kewajiban kepada badan hukum, sehingga badan hukum menjadi *person standi in judicio* atau subjek hukum mandiri.

b. Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Membahas tentang partai politik, mau tidak mau harus pula membahas mengenai pemilihan umum. Sebab hal ini mempunyai kaitan yang sangat erat antara partai politik dengan pemilihan umum. Berkaitan dengan hal ini Maurice Duverger memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Partai politik dan pemilihan umum merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan satu satu dengan yang lainnya, dan bahkan kadang-kadang sulit pula untuk memisahkan guna keperluan analisa; sebagai contoh tingkat ketetapan dalam badan perwakilan rakyat tergantung pada sistim pemilihan dan sistem kepartaian”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) UU N0 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa:

Peserta pemilihan umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD”. Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut tentunya suatu hal yang sangat tidak mungkin seandainya pemilihan umum dapat terlaksana jika tanpa keikutsertaan partai-partai politik sebagai pesertanya. Karena untuk

memperoleh kekuasaan, salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum, dengan melalui pemilihan umum.

c. Fungsi dan Peran Partai Politik

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo meliputi sarana: Komunikasi politik, Sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*), sarana rekrutmen politik, dan sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Selain fungsi partai politik yang telah dikemukakan di atas, setidaknya terdapat dua cara pandang mendefinisikan peran partai politik. Pertama, melihat partai politik dalam kerangka hubungan masyarakat dengan negara atau hubungan rakyat dengan negara dalam sistem politik demokrasi. Kedua, dari sisi partai politik sebagai instrumen mewujudkan suatu cita-cita politik atau pemikiran politik tentang negara-bangsa yang dipandang ideal (*the best regime, good society*). Karena itu partai politik dirumuskan sebagai pengorganisasian warga negara yang telah dewasa secara politik untuk mewujudkan suatu negara-bangsa yang dicita-citakan (ideologi).

2. Landasan Filosofi Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik

Ide dasar pendanaan parpol dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara dimaksudkan untuk mengurangi akses dalam persaingan para politisi merebut kekuasaan, yang berupa tindakan korupsi sebagai upaya untuk menutupi biaya kampanye yang memang sangat besar. Parpol yang dikuasai pemodal tentu akan merugikan rakyat kebanyakan. Itu sebabnya, pengaruh pemodal dalam kiprah parpol perlu

diminimalisasi untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi terakomodasinya kepentingan rakyat kecil. Pendanaan parpol oleh APBN pada dasarnya mencegah terlalu kuatnya cengkeraman pemodal pada parpol. Semakin besar ketergantungan parpol pada modal dari kaum kapitalis, semakin besar pula parpol itu terkooptasi oleh kepentingan sang kapitalis.

3. Bantuan Keuangan Partai Politik

a. Bantuan Keuangan dengan sistem perkursi sebagai instrument hubungan Negara dengan partai sebagai lembaga pengatur berkelompok

Partai Politik dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, "Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy", "*organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif*". Kedudukan partai politik dalam suatu Negara dianggap sangat penting dimana parpol merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi dalam memilih pemimpin dalam suatu Negara baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam pemilihan presiden misalnya partai politik merupakan ujung tombak untuk memobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan kandidat yang diusungnya.

Proses demokrasi dalam kehidupan tata negara di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, maka untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut harus melalui mekanisme partai politik yang telah diatur oleh dasar negara Indonesia yang menjadi pondasi partai politik dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia, mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dengan adanya pencantuman pasal tersebut menjadikan peran partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan lembaga negara yang ada, sehingga dalam proses pendemokrasian kehidupan ketatanegaraan, partai politik memiliki posisi strategis sebagai intermediate actor (aktor penghubung) dalam kekuasaan pemerintahan negara.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden harus melibatkan partai politik karena untuk menjadi seorang calon Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari salah satu partai politik yang telah lolos verifikasi menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum. Dengan diusulkannya calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum, maka secara tidak langsung seorang tersebut menjadi kader partai politik yang mengusungnya, diusulkannya kader dari partai politik menjadi calon atau bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden tentu memilih calon yang lebih loyal terhadap partai politiknya, sehingga akan memiliki ikatan yang kuat dengan partai politik yang mengusulkannya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, terlebih apabila calon yang akan diusulkan menjadi

calon atau bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden menduduki jabatan struktural atau kepengurusan didalam partai politik yang mengusulkannya. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan Presiden sebagai pengurus partai politik disalah satu partai politik yang mengusulkannya.

Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan umum” adalah sebuah konsekuensi logis dari Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu Pasangan secara langsung oleh rakyat” dengan adanya pemilihan yang dipilih oleh rakyat secara one man, one vote maka, mendorong partai politik sebagai wadah penampung aspirasi rakyat, untuk mengambil hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hak pilih warga negara dalam Pemilihan Umum adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka. Salah satu wadah yang dipersiapkan Negara buat rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil-wakilnya adalah partai politik. Melalui wadah partai politik inilah kemudian para wakil-wakil rakyat dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Memilih pemimpin atau wakil rakyat dalam pemilihan umum rakyat masing-masing mempunyai hak suara yang diberikan oleh Negara secara merata. Maksudnya hak suara tersebut masing-masing diberikan pada

satu orang satu suara atau lebih dikenal dengan istilah *one man one vote*. Jika demikian sudah sewajarnya partai politik dalam pemilihan umum berlomba-lomba mencari suara rakyat dalam rangka memilih para wakilnya melalui partai tersebut. Suara rakyat yang disalurkan melalui partai politik tersebut yang perlu mendapatkan penghargaan dari Negara melalui pemberian bantuan keuangan partai politik.

b. Bantuan keuangan dengan sistem persuara sebagai instrument hubungan Negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu Negara diberikan hak untuk memilih pemimpin sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Hal tersebut merupakan pencerminan dari penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam arti kekuasaan berada ditangan rakyat. Olehnya dalam memilih presiden maupun kepala daerah rakyat masing-masing memiliki hak suara untuk menentukan siapa yang menjadi keinginannya untuk memimpin dalam suatu Negara atau daerah. Dalam rangka mengakomodir hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tersebut, maka secara reel maka ditingkat daerahpun rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah merujuk pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. Makna kata “Demokratis” dalam Pasal 18 tersebut mengandung pengertian bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, *Pertama*, Pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), *Kedua*, Pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Didalam Pemilu ataupun pemilihan kepala daerah secara langsung dikenal

adanya satu prinsip yang disebut *one person, one vote, one value* artinya satu orang, satu suara, satu nilai). Sekalipun ada seseorang yang memiliki jabatan tinggi dalam struktur pemerintahan, atau mungkin ia adalah seorang pengusaha besar dengan kekayaan dan modal yang besar pula, mereka tetap memiliki nilai yang sama suaranya dengan seorang buruh tani, buruh, pabrik, kuli bangunan, ataupun kelas rakyat miskin lainnya. Atau bahkan seseorang yang memiliki posisi strategis/khusus dalam suprastruktur budaya masyarakat misal tokoh/pemuka agama, tokoh adat yang kharismatik dan memiliki ribuan pengikut proses pemberian suara dalam pemilu tidak berbeda dengan pengikutnya yakni tetap dihitung satu suara. Inilah konsekuensi seleksi pemimpin yang diserahkan kepada masyarakat, artinya setiap orang dianggap sama, setiap orang berhak menentukan siapa pemimpin yang terbaik. Jadi karena itu, demokrasi sekarang ini dianggap sebagai suatu mekanisme yang terbaik. Disamping itu, Pemilu juga dipandang sebagai mekanisme perebutan kekuasaan secara damai, karena didalam Pemilu sudah disebutkan siapa yang akan dicalonkan, prosedurnya seperti apa, dan ada wasitnya.

Sistem *one man one vote* dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah berlaku secara terbatas, sehingga suara rakyat tidak harus dibayar sebagaimana *one man one vote* berdasarkan persuara tetapi dapat dilakukan melalui instrument demokrasi lainnya dapat berupa keterwakilan kesejahteraan, keterwakilan kebutuhan, keterwakilan layanan, sehingga dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

4. Pengaturan Partai Politik Hubungannya dengan Sistem Keuangan Partai Politik

a. Pengaturan Partai Politik di Indonesia

Pengaturan partai politik di Indonesia telah berganti beberapa kali, tergantung

kepada kondisi ketatanegaraan dan UUD atau konstitusi yang berlaku saat itu. Secara singkat pengaturan partai politik di Indonesia diatur dalam peraturan berikut:

- a. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang Anjuran Pemerintah tentang Pembentukan Partai-Partai Politik.
- b. Penetapan Presiden Nomor 7 Pnps Tahun 1959 yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Pnpd Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan penyederhanaan Kepartaian. Berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain dinyatakan bahwa :
- c. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Prps Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai *Jo* Undang-Undang Nomor 25 Prps Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya *Jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pengaturan partai politik sangat dibutuhkan terutama dalam konteks Indonesia sebagai Negara Hukum. Pengaturan ini diperlukan dalam mengoptimalkan fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

b. Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan Negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan Negara. Pengelolaan keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Jadi ruang lingkup pengelolaan keuangan Negara meliputi: Perencanaan keuangan Negara, Pelaksanaan keuangan Negara, Pengawasan keuangan Negara; dan Pertanggungjawaban keuangan Negara.

c. Pengaturan Keuangan Partai Politik dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pengaturan keuangan partai politik dimaksudkan untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang. Hal ini perlu dilakukan karena misi partai politik yang mendapat monopoli untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan keuangan partai politik bukan bertujuan melarang partai politik menerima sumbangan dari pihak luar, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan partai politik, tetapi pada saat yang sama partai politik tetap terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan negara dan penerimaan daerah; Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang tentang perbendaharaan negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa “Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut azas

kesatuan, azas universalitas, azas tahunan, dan azas spesialisasi. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh Karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara pada tingkat pemerintah pusat, berfungsi pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Di Negara Indonesia sumber keuangan partai politik telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu pada Pasal 34 yaitu sumber keuangan partai politik. Pertama, iuran anggota. Kedua, sumbangan yang sah berdasarkan hukum, baik dari perseorangan (anggota maupun bukan anggota) maupun dari perusahaan dan/atau badan usaha dalam batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sumbangan ini dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sumbangan perseorangan dari anggota partai, selain iuran anggota, ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai masing-masing. Perseorangan yang bukan anggota partai dapat memberikan sumbangan maksimal Rp 1 miliar, sedangkan perusahaan dan/atau badan usaha dapat memberikan sumbangan kepada partai politik paling banyak Rp 7,5 miliar dalam satu tahun anggaran. Dan ketiga, bantuan dari anggaran negara (APBN dan APBD) yang diterima secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Bantuan keuangan ini diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai dan warga masyarakat, yaitu pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI),

pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan pangkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

4. Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 ayat (6) Permendagri ini memberikan pengertian tentang Keuangan Daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

5. Permendagri No 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tersebut, baik yang berasal dari APBN atau APBD harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing partai politik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Permendagri ini menyatakan Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan "Partai Politik Wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud terdiri dari: Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan Barang inventaris/ Modal (fisik), barang Persediaan Pakai Habis dan pengadaan/ penggunaan Jasa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik belum mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang berkeadilan. Pengaturan partai politik hubungannya dengan sistem keuangan parpol dilakukan secara profesional dan proporsional baik pengaturan dari segi sumber keuangan, jenis-jenis belanja, daftar penyumbang, laporan keuangan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap aturan hukum.

Rekomendasi

Agar Negara dapat memperlakukan partai politik secara adil terkait pemberian keuangan partai politik, maka Negara harus memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi tapi telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berupa suara sekalipun tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi di DPR maupun DPRD. Pemberian bantuan tersebut berdasarkan asas profesionalitas dan proporsionalitas, artinya pemberian bantuan tersebut dapat dibedakan antara partai yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD dengan partai yang tidak mendapatkan kursi.

Demi terciptanya pengelolaan keuangan partai politik yang lebih baik, harus dilakukan Pengaturan keuangan partai politik. Baik pengaturan dari segi sumber keuangan, jenis-jenis belanja, daftar penyumbang, laporan keuangan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap aturan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus dan ikhlas penulis sampaikan kepada bapak DR. H. Abdul Rasyid Thalib, S.H.,M.H selaku ketua tim pembimbing dan bapak DR. Jalaluddin, S.H., M.H selaku anggota tim pembimbing yang senantiasa sabar dan telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief Pratama, Muhammad, 2013, *Kedudukan Hukum Presiden Terhadap Partai Politik Pengusung*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Assiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Berita Antara News.com *Filosofi dibalik ide pendanaan Parpol*, terbit Kamis 19 maret 2015, diakses pada tanggal 28 November 2015
- Djafar Saidi, Muhammad, 2013, *Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hakim, Lukman, 2012, *Politik Hukum Pengaturan Partai Politik Dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia*, Bandung, Acarya Media Utama
- <https://dewaarka.wordpress.com/2010/01/06/hukum-parpol-dan-pemilu/>,
- Junaidi, Veri, 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*,

Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Michels, Robert, 1984, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta, Rajawali

Sigitwhibowo.blogspot.com/2012/05/kedudukan-partai-politik, diakses tanggal 8 Februari 2016

Surbakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik, 2011, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Wahyu, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana*, Artikel, Universitas Brawijaya